

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Eni Retnowati
eniretno40@gmail.com
Akhmad Riduwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of internal control system and accrual-based accounting understanding on financial statement quality of Regional Organization of Surabaya. While, the population was Regional Organization of Surabaya. Moreover, the data collection technique used purposive sampling, in which the sampel was based on criteria given. In line with, there were 15 agencies of Regional Organization of Surabaya as sample. So, the total data was 60 respondents which consist of Head of Finance and three finance staffs. Futhermore, the research was quantitative. Additionally, the data were primary with questionnaires as the instrument. Meanwhile, the questionnaires were distrubuted to agencies within Regional Organization of Surabaya. In addition, the data analysis technique used multiple linier regression. The research result concluded as follows: 1) internal control system had positive effect on financial statement quality of Regional Organization Of Surabaya, 2) accrual-based accounting understanding had positive effect on financial statement quality of Regional Organization Of Surabaya.

Keyword: internal control, accrual accounting understanding, financial statement quality

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan pemahaman akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Populasi pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam peneltian ini adalah teknik *purposive sampling*. Berdasarkan teknik *purposive sampling* kriteria yang telah ditentukan, diperoleh sampel sebanyak 15 dinas yang terdapat pada OPD Kota Surabaya dengan total responden 60 orang yang terdiri dari Kepala Bagian Keuangan dan tiga orang staf bagian keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dari penelitian ini dengan menggunakan data primer yaitu dengan menyebar kuesioner kepada dinas-dinas yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah 2) pemahaman akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata Kunci: pengendalian internal, pemahaman akuntansi akrual, kualitas laporan keuangan

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan fondasi utama dalam perkembangan dan majunya sebuah negara. Adanya era reformasi ekonomi saat ini, menjadikan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia berpengaruh dalam pembangunan ekonomi pusat maupun daerah. Menjadikan kinerja pemerintah kepada masyarakat adalah tanggungjawab wajib yang harus dipenuhi, dengan demikian mengharuskan para lembaga pemerintah memberikan informasi atas kinerjanya kepada publik. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik mempunyai tanggungjawab dalam proses pelayanan publik, sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Pemerintah sebagai entitas publik mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan (Kinarayanti dan Erawati, 2016). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, salah satunya dengan cara meningkatkan kewajiban transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan negara yaitu dengan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip, tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah berlaku.

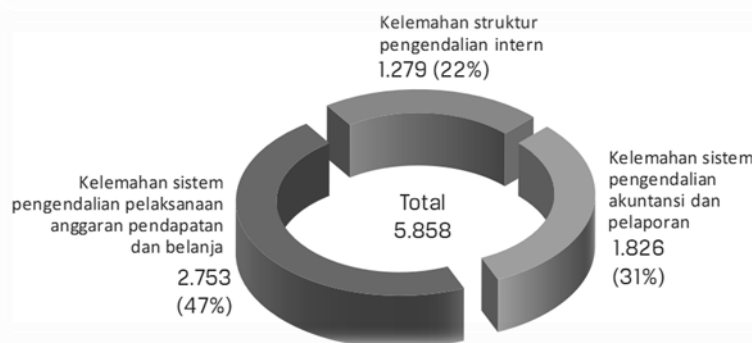
Bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas wewenang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada paragraf 7 pasal 320 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyajian laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dimana Standar Akuntansi Berbasis Akruwal. Pada tahun 2015 seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Indonesia seharusnya sudah merubah akuntansi basis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual penuh.

Dengan pemahaman Standar Akuntansi Berbasis Akruwal yang telah ditetapkan, akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki manfaat lebih baik bagi pengguna dan pemangku kepentingan, maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 disebutkan pula laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang memiliki unsur-unsur normatif. Karakteristik dari unsur-unsur normatif tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut menjadi syarat wajib untuk laporan keuangan apabila ingin dikatakan laporan keuangan daerah tersebut berkualitas.

Sedangkan dari segi transparansi dan akuntabilitas, Akuntansi Berbasis Akruwal dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel apabila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Hal ini disebabkan karena dalam akuntansi berbasis akrual seluruh beban yang terjadi baik yang sudah dibayar maupun belum dibayar dicatat dan diakui, dengan demikian akuntansi basis akrual dapat menghasilkan perhitungan biaya pelayanan publik yang lebih wajar. Disisi lain akuntansi basis akrual juga dapat menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik karena akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan informasi pengguna sumber daya ekonomi yang sebenarnya serta menyajikan pengungkapan kewajiban di masa yang kan datang (KSAP, 2006 dalam Jati, 2019).

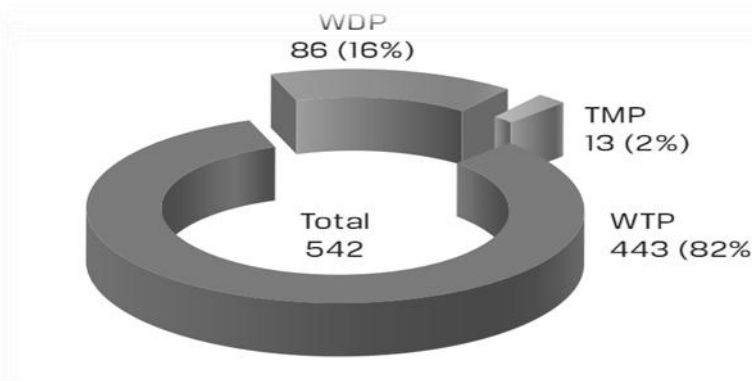
Tingginya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah juga ditentukan oleh seberapa baik sistem pengendalian Internal yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah Daerah (Karsana dan Suaryana, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) (Pradono dan Basukianto, 2015 dalam Aulia *et al.*, 2019). Sistem pengendalian diselenggarakan dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, menjamin kehandalan suatu laporan keuangan dan data keuangan suatu instansi pemerintahan (Aulia *et al.*, 2019).

Hasil pemeriksaan BPK pada 542 LKPD Tahun 2018 ditemukan 5.858 kelemahan SPI yang terdiri atas 1.826 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.753 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.279 permasalahan kelemahan struktur pengendalian internal. Ini menunjukkan bahwa SPI masih kurang diterapkan dalam lingkungan pemerintahan. Komposisi permasalahan kelemahan SPI tersebut disajikan pada gambar 1.



Gambar 1
Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI Atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2018
 Sumber: www.bpk.go.id -IHPS I Tahun 2019

Setiap tahunnya laporan keuangan daerah diawasi dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nantinya, BPK akan memberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Di dalam hasil audit BPK akan memberikan 4 macam opini, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer). Hasil pemeriksaan BPK pada semester I tahun 2019, BPK telah memeriksa 542 LKPD tahun 2018 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2018. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa untuk tahun 2018 target jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual sebanyak 26 provinsi dan 325 kabupaten/kota. Hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2018 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 443 (82%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 86 (16%) LKPD, dan opini Tidak menyatakan Pendapat (TMP) atas 13 (2%) LKPD seperti disajikan pada gambar 2.



Gambar 2
Grafik Opini LKPD Tahun 2018
 Sumber: www.bpk.go.id -IHPS I Tahun 2019

Dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur pemerintah Kota Surabaya pada LKPD tahun 2018 mendapat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dipertahankan pemerintah Surabaya selama tiga tahun dari tahun 2015-2018 disajikan pada gambar 3. Dengan demikian pemerintah kota Surabaya telah berhasil mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa LKPD yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Surabaya berkualitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: (1) apakah sistem pengendalian internal berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan daerah?; (2) apakah pemahaman akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Agency (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*), yaitu penerima amanah (*agent*) dengan pemberi amanah (*principal*). Dalam hal ini pemberi amanah (*principal*) memberikan wewenang kepada penerima amanah (*agent*) untuk membuat keputusan terbaik, disini *agent* melakukan jasa untuk dan atas nama *principal*. Dalam sektor publik teori keagenan sudah terjadi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terjadinya masalah pada *agent* dan *principal* karena adanya perbedaan kepentingan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam, yaitu Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2009:20).

Disini *agent* berkewajiban memberikan pelaporan laporan keuangan yang berkualitas terhadap *principal*. Bagi pengguna selaku pemberi amanah, laporan keuangan digunakan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan pemerintah yang disini sebagai penerima amanah. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan harus disampaikan secara tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah menurut PP No .71 Tahun 2010.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal menurut Mahmudi (2011:252) merupakan proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya sifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus. Apabila sistem pengendalian internal dalam suatu instansi lemah dan buruk kemungkinan besar akan menimbulkan berbagai masalah, seperti penyelewengan keuangan negara, korupsi, pemborosan anggaran, yang nantinya akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah (Mahmudi, 2011:251). Unsur Sistem pengendalian Internal menurut *The Committee Of Sponsoring Organizations (COSO)* yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), penilaian risiko (*risk assessment*), informasi dan komunikasi, pemahaman (*monitoring*). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 juga mengacu pada unsur pengendalian internal COSO dengan menggunakan 5 unsur utama dalam sistem pengendalian internal.

Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 (8) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan,

belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Pemahaman akuntansi berbasis akrual adalah pemahaman para anggota atau pegawai instansi pemerintah mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur yang berkaitan dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan (Kinarayanti dan Erawati, 2016). Untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabilitas serta memperjelas akan pemahaman akuntansi berbasis akrual, pemerintah mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual.

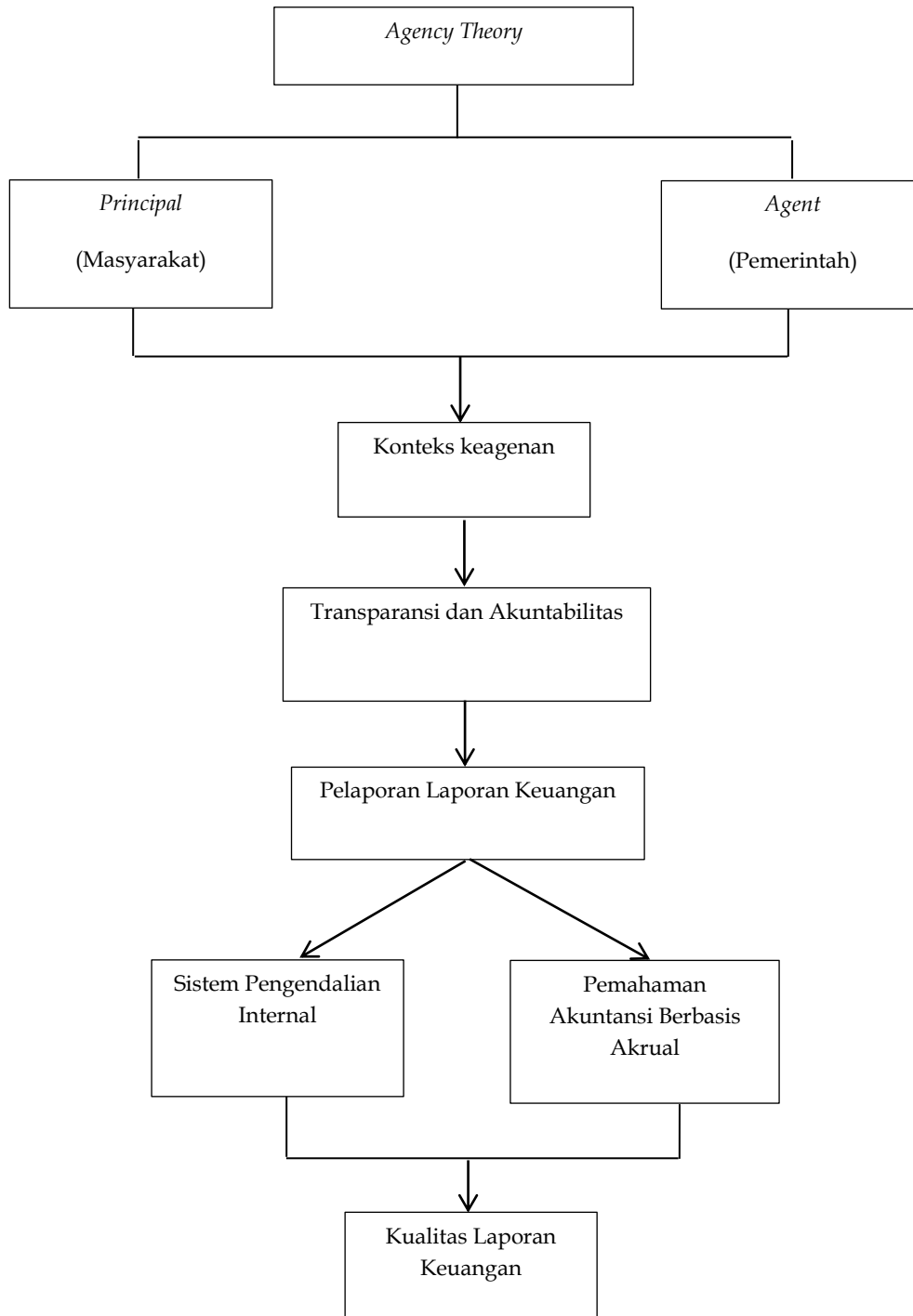
Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan selain sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan (Mahmudi, 2011). Kualitas laporan keuangan merupakan karakteristik kualitatif yang membuat informasi pada laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya (Jati, 2019: 4). Sebuah laporan keuangan menyajikan informasi untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Untuk menentukan laporan keuangan daerah tersebut berkualitas, maka laporan keuangan daerah tersebut harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur laporan keuangan tersebut berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan *agency theory*, pemerintah sebagai pihak pemegang kekuasaan amanah (*agent*) berkewajiban, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada para pemberi amanah (*principal*) dalam hal ini masyarakat. Namun masyarakat tidak memiliki banyak pengetahuan akan pelaksanaan pemerintah, maka diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan laporan keuangan.

Untuk mewujudkannya pemerintah terus melakukan upaya pengelolaan keuangan yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan dan sistem. Untuk menunjang peraturan perundang-undangan pemerintah mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual serta untuk menunjang sistem pemerintah mengeluarkan PP No. 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku serta diselenggarakan dengan Sistem Pengendalian Internal yang memadai akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh dalam kualitas laporan keuangan daerah. Dengan sistem pengendalian internal yang baik dan tepat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Menurut Ikasari *et al.* (2017), sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan RSUD Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian Karsana dan Suaryana (2017), menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pemahaman SAP Berbasis AkruaI diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas. Penelitian mengenai Pemahaman Basis AkruaI yang dilakukan oleh Kinarayanti dan Erawati (2016), menunjukkan bahwa pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akruaI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan Putri *et al.* (2017), tentang pemahaman regulasi akuntansi berbasis akruaI menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Aulia *et al.* (2019), menunjukkan bahwa pemahaman basis akruaI berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah:

H2: Pemahaman akuntansi berbasis akruaI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode kausal (causal reseach). Metode penelitian kuantitatif yaitu sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014: 14). Penelitian kausal merupakan penelitian yang mencari hubungan yang bersifat sebab akibat dari variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2014: 56). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya, dengan jumlah sampel 15 dinas yang setiap dinas diwakili oleh 4 responden yang terdiri dari 1 kepala bagian keuangan masing-masing dinas dan 3 staff bagian keuangan masing-masing dinas, sehingga diperoleh responden sebanyak 60 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling *purposive* (*purposive* sampling). Teknik *purposive* sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014: 122). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif sehingga data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berasal dari sumber primer, yang dikumpulkan melalui kuesioer. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode survey. Survey dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dari sampel yang telah dipilih. Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung oleh responden dengan memberi tanda check (√) pada jawaban yang telah disediakan. Skala yang dipakai dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014: 132). Skala Likert berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STJ)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Kurang Setuju (KS)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (S)

Definisi Operasional Variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan model Skala Likert lima poin. Indikator yang digunakan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan (monitoring).

Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrua

Pemahaman akuntansi berbasis akrual adalah pemahaman para anggota atau pegawai instansi pemerintah mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan model Skala *Likert* lima poin. Indikator yang digunakan yaitu PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas, PSAP 03 tentang laporan arus kas, PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang membuat informasi pada laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi penggunaannya (Jati, 2019: 4). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan model Skala Likert lima poin. Indikator yang digunakan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan pengujian yang menggunakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, dll (Ghozali, 2016). Variabel independen dan dependen penelitian ini adalah sistem pengendalian internal, pemahaman akuntansi berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan daerah yang dijabarkan dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
KLKD	56	41	55	48,18	4,165
SPI	56	47	70	59,77	5,024
PABA	56	28	40	34,07	3,247
Valid N (listwise)	56				

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Dalam tabel 1 menjelaskan bahwa variabel kualitas laporan keuangan daerah jawaban minimum responden sebesar 41, jawaban maksimum 55, dengan rata-rata jawaban 48,18 dan standar deviasi sebesar 4,165. Variabel sistem pengendalian internal jawaban minimum responden sebesar 47, jawaban maksimum 70, dengan rata-rata jawaban 59,77 dan standar deviasi sebesar 5,024. Variabel pemahaman akuntansi berbasis akrual jawaban minimum responden sebesar 28, jawaban maksimum 40, dengan rata-rata jawaban 34,07 dan standar deviasi sebesar 3,247.

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan apabila penelitian tersebut menggunakan kuesioner. Begitu pula dengan penelitian ini, hal tersebut disebabkan karena peneliti harus mengetahui bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian valid dan andal. Dengan valid dan andal maka kebenaran dari data yang diolah dapat dikatakan berkualitas. Dalam uji kualitas data ini peneliti dapat melakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji Validitas

Apabila suatu instrumen dikatakan valid maka hal tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya. Syarat untuk memenuhi pertanyaan yang dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel. Sebaliknya, jika r hitung $<$ r tabel maka pertanyaan tidak valid (Ghozali, 2016). Pada tabel 2 dibawah ini merupakan hasil uji validitas dari variabel yaitu sistem pengendalian internal, pemahaman akuntansi berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan daerah.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	SPI1	.671**	0,2632	Valid
	SPI2	.756**	0,2632	Valid
	SPI3	.501**	0,2632	Valid
	SPI4	.796**	0,2632	Valid
	SPI5	.806**	0,2632	Valid
	SPI6	.575**	0,2632	Valid
	SPI7	.773**	0,2632	Valid
	SPI8	.678**	0,2632	Valid
	SPI9	.717**	0,2632	Valid
	SPI10	.723**	0,2632	Valid
	SPI11	.749**	0,2632	Valid
	SPI13	.667**	0,2632	Valid
	SPI14	.622**	0,2632	Valid
	Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrual	PABA1	.473**	0,2632
PABA2		.759**	0,2632	Valid
PABA3		.674**	0,2632	Valid
PABA4		.745**	0,2632	Valid
PABA5		.748**	0,2632	Valid
PABA6		.725**	0,2632	Valid
PABA7		.748**	0,2632	Valid
PABA8		.846**	0,2632	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	KLKD1	.746**	0,2632	Valid
	KLKD2	.659**	0,2632	Valid
	KLKD3	.770**	0,2632	Valid
	KLKD4	.689**	0,2632	Valid
	KLKD5	.592**	0,2632	Valid
	KLKD6	.677**	0,2632	Valid
	KLKD7	.574**	0,2632	Valid
	KLKD8	.799**	0,2632	Valid
	KLKD9	.779**	0,2632	Valid
	KLKD10	.824**	0,2632	Valid
	KLKD11	.735**	0,2632	Valid

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Dari 2 tabel diatas dapat dijelaskan bahwa variabel kualitas laporan keuangan daerah (KLKD), sistem pengendalian internal (SPI), pemahaman akuntansi berbasis akrual (PABA), diperoleh nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0,2632. Ini berarti seluruh pertanyaan pada masing-masing variabel dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Hasil uji reliabilitas dapat menggunakan metode *Alfa Cronbach*, dengan kriteria *Alfa Cronbach* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 maka dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2016). Pada tabel 3 merupakan hasil uji reliabilitas dari variabel yaitu kualitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan pemahaman akuntansi berbasis akrual.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r Hitung	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	,906	0,6	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	,920	0,6	Reliabel
Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrual	,843	0,6	Reliabel

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

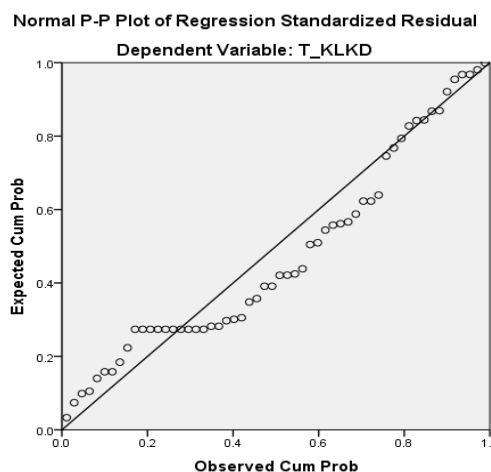
Dari tabel 3 dapat dijelaskan bahwa hasil uji reliabilitas dari kualitas laporan keuangan daerah. Dari hasil *Cronbach's Alpha* sebesar 0,906. Maka dapat disimpulkan bahwa kesebelas pertanyaan dalam kuesioner pada variabel kualitas laporan keuangan daerah dinyatakan reliabel karena *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6. Hasil uji reliabilitas dari sistem pengendalian internal. Dari hasil *Cronbach's Alpha* sebesar 0,920. Maka dapat disimpulkan bahwa keempat belas pertanyaan dalam kuesioner pada variabel sistem pengendalian internal dinyatakan reliabel karena *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6. Hasil uji reliabilitas dari pemahaman akuntansi berbasis akrual. Dari hasil *Cronbach's Alpha* sebesar 0,843. Maka dapat disimpulkan bahwa kedelapan pertanyaan dalam kuesioner pada variabel pemahaman akuntansi berbasis akrual dinyatakan reliabel karena *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6. Dari variabel kualitas laporan keuangan daerah (KLKD), sistem pengendalian internal (SPI), pemahaman akuntansi berbasis akrual (PABA), diperoleh nilai r hitung lebih besar dari nilai *Cronbach's Alpha* yaitu 0,6. Ini berarti seluruh pertanyaan pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2006), yang terdiri dari :

Uji Normalitas

Dalam uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dan dalam pengujian ini akan dapat disimpulkan jika sebaran data atau variabel berdistribusi normal berarti model regresi yang digunakan oleh peneliti dapat dikatakan baik. Dibawah ini adalah gambar grafik hasil uji normalitas.



Gambar 3
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot
Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Dari gambar 3 dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal, dengan adanya hal tersebut maka model regresi layak digunakan. Hal tersebut terlihat bahwa dalam grafik *probability plot* memperlihatkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,38704695
Most Extreme Differences	Absolute	,134
	Positive	,134
	Negative	-,109
Test Statistics		,134
Asymp. Sig. (2-tailed)		.084 ^c

a. Test distribution is Normal
 b. Calculated from data
 c. Lilliefors Significance Correction
Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan pengujian uji *Kolmogorov Smirnov* pada tabel 14 diatas maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Hal itu dibuktikan bahwa *asympt. Sig (2-tailed)* menunjukkan angka 0,084 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam uji normalitas dengan menggunakan grafik *probability plot*, grafik *histrogram* dan uji *Kolmogorov Smirnov* bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak digunakan karena telah memenuhi kriteria normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan karena analisis regresi terdapat asumsi yang mensyaratkan bahwa variabel bebas (*independen*) harus terbebas dari segala multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel *independen*. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak, yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance* diatas 0,1 dan nilai *VIF* dibawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinieritas, artinya model regresi tersebut baik. Namun, jika nilai *Tolerance* dibawah 0,1 dan nilai *VIF* diatas 10, maka terjadi kesalahan

multikolinieritas, artinya model regresi tersebut tidak baik. Pada tabel 5 dibawah ini merupakan hasil uji multikolinieritas.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,621	4,207		1,098	,277		
	SPI	,512	,078	,618	6,539	,000	,694	1,440
	PABA	,380	,121	,296	3,135	,003	,694	1,440

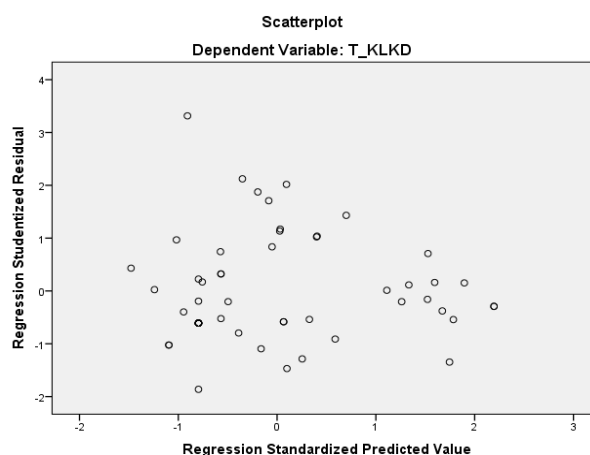
a. Dependent Variable: KLKD

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dijabarkan bahwa nilai tolerance dari variabel sistem pengendalian internal dan pemahaman akuntansi berbasis akrual yaitu 0,694, sedangkan nilai VIF pada tabel tersebut dapat dijabarkan bahwa variabel sistem pengendalian internal dan pemahaman akuntansi berbasis akrual 1,440. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinieritas, artinya model regresi tersebut baik, sebab nilai Toleranace diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi, serta menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan deviasi standar nilai pada variabel dependen disetiap variabel independennya dalam suatu model regresi. Apabila titik-titik dalam grafik tersebut membentuk pola yang teratur maka dapat disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas. Apabila titik-titik dalam grafik membentuk pola yang menyebar diatas dan dibawah angka nol sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Pada gambar 4 dibawah ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas.



Gambar 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan gambar 4 dapat dijabarkan bahwa titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa grafik *scatterplot* membuktikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,621	4,207		1,098	,277		
	SPI	,512	,078	,618	6,539	,000	,694	1,440
	PABA	,380	,121	,296	3,135	,003	,694	1,440

a. Dependent Variable: KLKD
 Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi yaitu metode regresi linier berganda. Pengujian regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independennya (Sugiyono, 2014). Peneliti menggunakan metode regresi linier berganda karena dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen. Pada tabel 6 dibawah ini merupakan hasil dari uji regresi linier berganda. Berikut ini adalah rumus metode analisis regresi berganda dalam penelitian ini:

$$KLKD = \alpha + \beta_1SPI + \beta_2PABA + \epsilon$$

Dari data diatas didapat model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KLKD = 4,621 + 0,512SPI + 0,380PABA + \epsilon$$

Uji Kelayakan Model Penelitian (Uji F)

Uji Kelayakan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk menguji kesesuaian model (*Goodness of fit*). Sehingga dapat dilihat apakah model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak. Berikut adalah hasil dari uji kelayakan (Uji F). Jika nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa model persamaan yang dihasilkan layak untuk digunakan pada penelitian. Pada tabel 7 dibawah ini merupakan hasil uji kelayakan (Uji F).

Tabel 7
Hasil Uji Kelayakan (Uji F)
ANOVA

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	640,825	2	320,412	4,188	.000 ^b
	Residual	313,390	53	5,913		
	Total	954,214	53			

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Dari data tabel 7 diatas dapat dijabarkan bahwa angka F yaitu 4,188 dengan Sig. 0,000 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa model persamaan yang dihasilkan layak atau *fit* untuk digunakan pada penelitian.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi terletak antara nol dan satu (0 < R² < 1). Apabila nilai R² mendekati 0 menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sedangkan nilai R² yang mendekati 1 menunjukkan semakin besar kemampuan variabel-variabel dependen

dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016). Pada tabel 8 ini merupakan hasil uji determinasi (R^2).

Tabel 8
Hasil Uji Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.819 ^a	.672	.659		2,432	1,452

a. Predictors: (Constant), PABA, SPI

b. Dependent Variable: KLKD

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 8 hasil dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,672 atau 67,2% yang berarti variabel bebas yang terdiri dari sistem pengendalian internal dan pemahaman akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sisanya sebesar 32,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Uji Statistik (Uji t)

Tabel 9
Hasil Uji Statistik (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4,621	4,207		1,098	,277	
	SPI	,512	,078	,618	6,539	,000	Berpengaruh
	PABA	,380	,121	,296	3,135	,003	Berpengaruh

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat dijabarkan bahwa H_1 dengan nilai t hitung 6,539 dan Sig. Sebesar $0,000 \leq 0,05$ maka dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan untuk H_2 dengan nilai t hitung 3,135 dan Sig. Sebesar $0,003 \leq 0,05$ maka dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, dapat diartikan bahwa pemahaman akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan uji statistik t diatas dapat dijabarkan bahwa H_1 dengan nilai t hitung 6,539 dan Sig. sebesar $0,000 \leq 0,05$ maka dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Menurut Kiranayanti dan Erawati (2016) sistem pengendalian internal bertujuan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sistem Pengendalian Internal sangatlah diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan daerah agar hasil laporan keuangan daerah berkualitas. Selain untuk menjadikan laporan keuangan daerah menjadi berkualitas sistem pengendalian internal digunakan untuk mencegah adanya penggelapan dan penyelewengan dana pemerintah.

Dengan penerapan sistem pengendalian internal disetiap OPD yang ada di Kota Surabaya akan menjadikan laporan keuangan Kota Surabaya semakin baik dan berkualitas. Ini terbukti dengan laporan keuangan Kota Surabaya mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa

Pengencualian) selama tiga tahun yaitu pada tahun 2015-2018. Salah satunya yang termasuk dalam sistem pengendalian internal adalah masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) telah menerapkan kode etik secara tertulis bagi para pegawai. Dengan demikian diharapkan para pegawai dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan tujuan masing-masing OPD serta mereka mampu untuk bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Dengan begitu para pegawai mampu untuk mewujudkan tujuan dari masing-masing OPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikasari *et al.* (2017), Karsana dan Suaryana (2017), Putri *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan uji statistik t diatas dapat dijabarkan bahwa H_2 dengan nilai t hitung 3,135 dan Sig. sebesar $0,003 \leq 0,05$ maka dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman akuntansi berbasis akruaI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pemahaman akuntansi berbasis akruaI berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut baru diwajibkan pada tahun 2015 walaupun sudah diterbitkan regulasi pada tahun 2010. Alasannya adalah penerapan yang cukup lama karena masih adanya instansi pemeritah yang perlu diberikan pelatihan mengenai aturan baru tersebut (Kinarayanti dan Erawati, 2016).

Pemahaman akuntansi berbasis akruaI merupakan pemahaman para anggota atau pegawai instansi pemerintah mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah. Dalam hal ini para pegawai di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Surabaya telah memahami secara baik dan seksama akuntansi berbasis akruaI. Dengan adanya pemahaman akuntansi berbasis akruaI dalam penyusunan laporan keuangan daerah menjadikan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari tahun 2015-2018. Jadi dapat disimpulkan jika pemahaman akuntansi berbasis akruaI meruapakan faktor efektif dalm meningkatkann kualitas laporan keangan daerah (Sari *et al.*, 2014)

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kinarayanti dan Erawati (2016), Putri *et al.* (2017), Aulia *et al.*(2019) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berbasis akruaI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dapat diartikan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi berbasis akruaI maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dapat diartikan bahwa dengan semakin meningkatnya sistem pengendalian internal maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan daerah. Pemahaman akuntansi berbasis akruaI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dapat diartikan bahwa dengan semakin meningkatnya pemahaman akuntansi berbasis akruaI maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan daerah.

Saran

Sampel penelitian pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya, sedangkan belum seluruh OPD menjadi sampel seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Kecamatan dan Kelurahan. Variabel independen masih terdiri

dari dua variabel seperti sistem pengendalian internal dan pemahaman akuntansi berbasis akrual. Sedangkan masih banyak variabel independen lain. Adanya keterbatasan dalam penelitian ini juga dengan menggunakan kuesioner, sedangkan dengan metode ini terkadang belum terlalu akurat. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian, tidak hanya pada OPD Kota Surabaya saja tetapi juga pada OPD Kota atau Kabupaten lainnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menyebar kuesioner saja tetapi juga diikuti dengan wawancara secara langsung kepada responden agar didapat hasil yang lebih akurat. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya dapat menambah variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, seperti komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, efektivitas sistem informasi manajemen daerah dan efektivitas sistem informasi akuntansi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yang belum diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, A., B. Susetyo, dan T. B. Raharjo. 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Basis Akrual, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Tegal). *Permana Journal* 11(2): 83-96.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. 2019. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini LKPD Kota Surabaya Tahun 2011- 2018. www.surabaya.bpk.go.id. Diakses Tanggal 03 Januari 2020.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. UNDIP Semarang.
- . 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. UNDIP Semarang.
- Ikasari, L. P., Suharno, dan B. Widarno. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 13(4): 484-497.
- Jati, B.P. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *WAHANA* 21(1): 1-14.
- Karsana, I. W., dan I. G. N. A. Suaryana. 2017. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sap, Kompetensi SDM Dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21(1): 643-670.
- Kinarayanti, I. A. E. dan N. M. A. Erawati. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(2): 1290-1318.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pers. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Tentang *Sistem Pengendalian Internal*.
- . Nomor 71 Tahun 2010. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Putri, D. I., S. Rahayu, dan A. Nurbaiti. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E-Proceeding of Management* 4(2): 1732-1739.
- Pradono, C. F., dan Basukianto. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Faktor Yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi pada SKPD Kabupaten Pasaran Barat). *JOM Fekon* 2(2):1-15.

- Sari, N. P. Y. M. M., I. M. P. Adiputra, dan E. Sujana. 2014. Pagaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 2(1).
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Tentang *Pemerintah Daerah*.